

LAPORAN KEUANGAN



2025

KELURAHAN CIPETE SELATAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4368).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Republik Indonesia dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

12. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 130 tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta.
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2011 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Operasional dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan keuangan.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- Menyajikan informasi tentang pencapaian target, peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- Mengungkapkan informasi untuk pos-pos LRA, Neraca, Laporan Operasional
- Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Secara umum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan berfokus pada ekonomi makro yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mewujudkan peningkatan daya saing kelompok binaan industri kecil dan menengah dengan orientasi ramah lingkungan yang sinergis dengan kemitraan industri besar sehingga menghasilkan kualitas produk yang berdaya saing. Mewujudkan ketersediaan energi kebutuhan kota, termasuk energi yang terbarukan, secara efektif, efisien dan ekonomis serta berkesinambungan, serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pencahayaan kota Jakarta yang berbasis hemat energi dan berstandar Internasional.

2.2 Kebijakan Keuangan

Secara umum Kebijakan keuangan mencakup 2 aspek penting yaitu kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan dibidang pengeluaran/belanja.

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

Kebijakan Keuangan yang dipakai oleh Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan prinsip kebijakan otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan tugas dan kewenangannya, maka untuk lebih meningkatkan kemandirian dalam membiayai kegiatan maka dilaksanakan dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan penerimaan yang bersumber dari

retribusi jasa usaha khususnya penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi penjualan produksi usaha daerah

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

2.3.1 Visi dan Misi Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan

Visi “Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima di Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak”

Misi:

1. Mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
2. Meningkatkan peranan aparat dalam merespon aspirasi dan permasalahan warga;
3. Meningkatkan sumber daya aparat pemerintah kelurahan;
4. Meningkatkan pengetahuan warga untuk mematuhi perda Provinsi DKI Jakarta.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan pada Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah nol dikarenakan Anggaran Kelurahan Cipete Selatan Belanja Langsung

3.1.2 Belanja

Belanja pada LRA Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga yang dapat digambarkan pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Operasi	10.669.338.383,00	10.362.916.396,00
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang dan Jasa	10.669.338.383,00	10.362.916.396,00
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	-	-
Belanja Tanah	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	44.777.447,00	32.578.500,00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara umum tidak ada kendala dan hambatan dalam pencapaian target yang telah di tetapkan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintah daerah yang ditunjuk/diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Entitas akuntansi mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok, fungsi setiap unit/satuan kerja pada pemerintah daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pada pemerintahan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, beban maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

4.2.1 Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 1 Januari 2025 s/d per 31 Desember 2025, yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Neraca
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

a. Penjelasan Umum LRA

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan. Belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam

catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara lain angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- Pendapatan
- Belanja
- Transfer
- Surplus atau defisit
- Penerimaan pembiayaan
- Pengeluaran pembiayaan
- Pembiayaan neto; dan
- Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (SILPA / SIKPA)

Pos, judul dan sub jumlah aslinya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh pernyataan standar Akuntansi Pemerintah ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan sesuatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga. Subsidi, hibah, bantuan sosial.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan peralatan dan aset tak berwujud.

Belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah pusat/ daerah.

b. Penjelasan Umum Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar).

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Sedangkan informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah dalam neraca didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Struktur Neraca Pemerintah Pusat memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan struktur Neraca Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Perbedaan tersebut diakibatkan karena kepemilikan aset negara berbeda dengan kepemilikan aset di daerah. Aset negara lebih kompleks dibandingkan dengan aset daerah. Salah satu contohnya adalah kas. Kas di Pemerintah Pusat termasuk kas yang ada di Bank Indonesia.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa neraca menggambarkan Penyusunan dan penyajian Aset dan kewajiban. Dalam neraca kadang-kadang memiliki dasar pengukuran yang berbeda, tergantung dari sifat dan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dapat dicatat atas dasar biaya perolehan, sedangkan kelompok lainnya dapat dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasi. Secara garis tentang jenis-jenis aset, kewajiban dan ekuitas serta pengakuan dan pengukurannya pada neraca dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam neraca aset terbagi atas 2, yaitu:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

b. Aset Nonlancar

Aset nonlancar merupakan aset pemerintah yang penggunaannya diharapkan melebihi satu periode pelaporan (1 tahun), terdiri dari aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, serta aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah maupun yang digunakan oleh masyarakat umum. Untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca, aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang berupa investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, seperti: Investasi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Sedangkan investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti: Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN/BUMD, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari: a) Tanah; b) Peralatan dan mesin; c) Gedung dan bangunan; d) Jalan, irigasi, dan jaringan; e) Aset tetap lainnya; dan f) Konstruksi dalam pengerjaan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Pengakuan aset dilakukan apabila ada potensi manfaat ekonomi di masa depan yang akan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau dapat diakui juga pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah ke tangan Pemerintah. Sedangkan untuk pengukuran atau pencatatan suatu aset tergantung dari jenis asetnya, diantaranya adalah dengan cara sebagai berikut:

Kas dicatat sebesar nilai nominal;

Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;

Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

Persediaan dicatat sebesar:

- Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut; Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola (membangun sendiri) meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Sedangkan untuk aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Kewajiban

Kewajiban pemerintah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah terbagi 2 jenis, yaitu:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu diatas 12 (dua belas) bulan. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

Kewajiban tersebut bermaksud didanai kembali (refinancing) sebagai kewajiban jangka panjang oleh pemberi pinjaman dan didukung dengan adanya suatu perjanjian atau penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Pengakuan Kewajiban dilakukan pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul, dengan nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dalam rupiah, sementara kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Berkaitan dengan jenis-jenis aset, kewajiban dan ekuitas diatas, suatu entitas dapat menentukan subklasifikasi pos-pos yang disajikan dalam neraca. Pengklasifikasian dilakukan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan.

c. Penjelasan Umum LO

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan.

Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Namun jika laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke setiap fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Dalam memilih penggunaan kedua metode klasifikasi beban tersebut tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka SAP memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak pada entitas tersebut.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi juga harus mengungkapkan tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Sama halnya dengan LRA, struktur Laporan Operasional Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perbedaan. Perbedaan struktur tersebut juga diakibatkan karena perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, yang membedakan antara LRA dengan LO diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.
2. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual.
3. Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Pada LRA, pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan pada LO, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan.

d. Penjelasan Umum Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4.2.2 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

1. Menyajikan informasi tentang pencapaian target, peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
3. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis akrual;
5. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum disetor ke rekening kas umum daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

- **Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- **Kas**

Kas di Bendahara pengeluaran adalah uang yang dikuasai Bendahara Pengeluaran, yang berupa kas di brankas dan kas di rekening Bank. Kas dinilai dengan nilai nominal.

- **Persediaan**

Persediaan adalah barang-barang yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau diserahkan/ dijual kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Persediaan dibukukan berdasarkan stock opname yang dilakukan tiap akhir tahun.

- **Aset Tetap**

Tanah

Tanah yang dibeli sampai dengan tahun 2025 dinilai dengan nilai wajar yaitu Nilai jual objek pajak (NJOP) PBB tahun 2025 dan jika tanah dibeli setelah tahun 2025 dinilai dengan nilai wajar yaitu harga perolehannya.

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin selain alat-alat angkut (kendaraan) dinilai dengan harga perolehan, atau jika tidak ditemukan harga perolehannya, maka dilakukan berdasarkan taksiran dengan membandingkan dengan data harga barang yang sejenis. Alat-alat angkut (kendaraan) yang pembeliannya sampai dengan tahun 2025 dinilai dengan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 51 tahun 2007, sedangkan alat-alat angkut (kendaraan) yang diperoleh setelah tahun 2024 dinilai dengan harga perolehan.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dibeli/diperoleh sampai dengan tahun 2025 dengan nilai wajar yaitu harga berdasarkan Daftar Jual Permeter yang dikeluarkan oleh Asosiasi Masyarakat Penilai Indonesia, jika diperoleh setelah tahun 2025 dinilai dengan nilai wajar yaitu harga perolehannya.

- Aset Lainnya

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang berupa hasil penelitian, Kajian dan hasil intelektual lainnya yang tidak termasuk dalam aset tetap.

Aset Rusak Berat

Aset Rusak Berat adalah aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya dikarenakan rusak tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.

Ekuitas

Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1 Penjelasan per Pos LRA

Pendapatan

Pendapatan pada Laporan Keuangan Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp.0,- dikarenakan pendapatan dipusatkan pada Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Belanja

Belanja pada LRA Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.2 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Operasi	10.669.338.383,00	10.362.916.396,00
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang dan Jasa	10.669.338.383,00	10.362.916.396,00
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	44.777.447,00	32.578.500,00
Belanja Tanah	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	44.777.447,00	32.578.500,00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-

- Belanja Operasi Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp 10.362.916.396,00 atau 97,13% dari anggaran yang tersedia pada tahun 2025 sebesar Rp 10.669.338.383,00 diantaranya :
Penyerapan belanja barang dan jasa senilai Rp 10.362.916.396,00 atau 97,13% dari anggaran senilai Rp 10.362.916.396,00

- Belanja Modal Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan telah direalisasikan sebesar Rp 32.578.500,00 atau 72.76% atas belanja Peralatan dan Mesin dari anggaran sebesar Rp 44.777.447,00.

5.1.2 Penjelasan per Pos Neraca

Aset Lancar..... Rp. 84.045.336,-

Aset Lancar Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 84.045.336,-

Beban Dibayar Dimuka.....Rp. 26.735.380,-
Per 31 Desember 2025 terdapat beban dibayar dimuka sebesar Rp 26.048.849,-

Nilai persediaan sebesar Rp 56.309.956,-
Saldo Persediaan Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan nilai saldo sebesar Rp. (15.231.407,-) dari saldo tahun 2024. Nilai persediaan sebesar Rp 71.541.363,- didapat dari Persediaan Bahan Pakai Habis Rp 71.541.363,- Persediaan Barang Tak Habis Pakai Rp. 0, dan Persediaan Barang Bekas Dipakai Rp. 0,-

Aset Tetap.....Rp 5.479.465.753,-
Aset Tetap Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 5.479.465.753,- mengalami penurunan sebesar Rp. 36.887.387,- dari tahun sebelumnya. Adapun rincian Aset Tetap diantaranya :

Tabel 5.3 Daftar Aset Tetap Per 31 Desember TA 2025

Daftar Aset tetap	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024
Tanah	4.800.000.000	4.800.000.000
Peralatan dan Mesin	1.466.665.535	1.409.278.535
Gedung dan Bangunan	2.022.207.677	2.022.207.677
Jalan, Jaringan & Instalasi	0	0
Asset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.374.453.620)	(1.338.904.617)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.434.953.839)	(1.376.228.455)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Asset Tetap Lainnya	0	0
Jumlah	5.479.465.753	5.516.353.140

Tanah Rp.4.800.000.000,-
Saldo aset tetap tanah tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan nilai pada tahun 2025.

Peralatan dan Mesin..... Rp. 1.466.665.535,-
Saldo aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar Rp. 1.466.665.535,-
,- mengalami kenaikan nilai sebesar Rp. 57.387.000,- dari nilai saldo tahun 2024. Kenaikan saldo aset tetap peralatan dan mesin tersebut didapat dari nilai saldo akhir tahun 2025 sebesar Rp. 1.466.665.535,- dengan rincian :
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2024.....Rp 1.409.278.535,-

Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan nilai pada tahun 2025.

Jalan, irigasi dan Jaringan
Saldo Aset Tetap Jalan, irigasi dan Jaringan tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan nilai pada tahun 2025.

Aset Tetap Lainnya
Saldo aset tetap lainnya tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan nilai pada tahun 2025.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....Rp. -2.809.407.459,-
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. -2.809.407.459,- merupakan akumulasi penyusutan sampai dengan per 31 Desember 2025. Saldo tersebut didapat dari akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. -1.374.453.620,-, akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp. -1.434.953.839,-, akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 0,-, dan akumulasi aset tetap lainnya sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset Lainnya.....Rp. 673.654.583,-
Aset Lainnya Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2025 yang terdiri dari Aset Tetap Rusak Berat sebesar Rp. 673.654.583,- dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat sebesar Rp. 673.654.583,-

Kewajiban Jangka Pendek Rp.0,-
Saldo kewajiban jangka pendek Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,-mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,- dari saldo kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-

Ekuitas – LO Rp. -6.265.605.018,-
Saldo ekuitas - LO Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. -6.265.605.018,-

RK PPKD.....Rp. 10.375.340.798,-
Saldo RK PPKD Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. . 10.375.340.798,-

5.1.3 Penjelasan per Pos LO

Laporan Operasional terdiri dari :

- Pendapatan LO

Pendapatan pada Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah Rp 0,-. Dikarenakan Kelurahan Cipete Selatan bukan Pemungut Retribusi daerah.

Beban Operasi tahun 2025 sebesar Rp. 10.356.717.529,- dengan rincian :

- Beban Pegawai senilai Rp. 0,-
- Beban Persediaan senilai Rp. 0,-
- Beban Barang pada Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.127.883.151,-
- Beban Jasa pada Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan diambil realisasi belanja jasa, belanja TALI per 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.721.967.842,-
- Beban Pemeliharaan pada Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan diambil realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp. 85.641.536,-
- Beban Penyusutan dan Amortisasi terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya sebesar Rp. 100.437.260,-
- Beban Hibah adalah Rp. 0,-
- Surplus / Defisit LO dari nilai Pendapatan-LO Rp.0,- dikurang dengan total nilai beban Rp. -10.457.154.789,- sehingga Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Administrasi Jakarta Selatan mengalami Defisit sebesar Rp. -10.457.154.789,-

5.1.4 Penjelasan Umum Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

- Nilai Ekuitas Awal pada Ekuitas LO didapat dari nilai Ekuitas Akhir Tahun 2025 sebesar Rp. 5.635.292.634,-
- Perubahan Ekuitas = Nilai Surplus/Defisit Lo + Mutasi RK/PPKD + Koreksi Ekuitas = Rp. -81.240.020,-
 - Nilai Surplus/Defisit LO Rp - 10.457.154.789,- nilainya didapat hasil Surplus/Defisit LO dari Laporan Operasional,
 - Mutasi RK PPKD Rp. 10.410.812.896,-
 - Koreksi Ekuitas Rp. - 34.898.127,-
- Nilai Ekuitas Akhir = Rp. 5.554.052.614,-
 - Ekuitas LO = Nilai Ekuitas LO awal + Surplus/Defisit Lo + Koreksi Ekuitas = Rp. - 4.856.760.28,-
 - RK PPKD = Nilai Mutasi RK PPKD senilai Rp. 10.410.812.896,-

5.2 Pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan penerapan basis kas atas pendapatan dan belanja serta basis akrual atas pendapatan dan beban

▪ Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2025 menggambarkan realisasi anggaran mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Realisasi pendapatan sebesar Rp. 0,- dari target sebesar Rp 0,-

Realisasi belanja berdasarkan terbitnya SPJ adalah Rp. 10.395.494.896,- atau 97,03% dari anggaran sebesar Rp. 10.714.115.830,-

Adapun realisasi belanja tersebut terdiri dari :

- belanja Pegawai sebesar	Rp.	0,-
- belanja barang dan jasa sebesar	Rp.	10.362.916.396,00,-
- belanja modal sebesar.....	Rp.	32.578.500,00,-

Sehingga Surplus / (Defisit) sebesar Rp - 10.395.494.896,-

▪ Laporan Operasional

Laporan Operasional yang berakhir 31 Desember 2025 menggambarkan beban dari realisasi belanja mencakup unsur-unsur pendapatan LO dan Beban Operasi. Realisasi

Pendapatan-LO merupakan nilai pendapatan Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp 0,-

Adapun Beban Operasi sebesar Rp. 10.356.717.529,- dengan rincian :

- Beban Pegawai.....	Rp	0,-
- Beban Barang.....	Rp	1.127.883.151,-
- Beban Jasa.....	Rp	6.721.967.842,-
- Beban Pemeliharaan.....	Rp	85.641.53,-
- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak.....	Rp	2.421.225.000,-
- Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	Rp.	100.437.260,-

Sehingga Surplus / (Defisit) LO didapat dari pendapatan Lo dikurang Beban Operasi sehingga sebesar Rp. -10.457.154.789,-



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

6.1 Domisili

Kelurahan Cipete Selatan beralamatkan di Jl. Palem No.17A Kecamatan Cilandak dengan nomor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : 50141005

6.2 Penggantian Bentuk Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah.

6.3 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi:

1. Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
2. Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 2. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 3. pelaksanaan pelayanan masyarakat Kelurahan;
 4. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum Kelurahan;
 5. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Kelurahan;
 6. pembinaan dan koordinasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan;
 7. pembinaan dan koordinasi rukun warga dan rukun tetangga;
 8. penetapan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
 9. pengelolaan kesekretariatan Kelurahan; dan
 10. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. pelaksanaan penanganan segera, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan;
 12. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan permukiman masyarakat Kelurahan;
 13. fasilitasi pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan di wilayah Kelurahan;
 14. fasilitasi pengawasan jam belajar malam pada masyarakat serta Pemantauan Anak Putus Sekolah dan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar;
 15. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat;

16. fasilitasi penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pos Pelayanan Terpadu dan pemantauan jentik nyamuk;
17. fasilitasi penyelenggaraan pos pembinaan terpadu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Rukun Warga siaga; dan
18. fasilitasi pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

6.4 Struktur Organisasi

Secara garis besar struktur organisasi Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

terdiri dari:

1. Lurah
2. Sekretariat Kelurahan
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat
5. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup



BAB VII

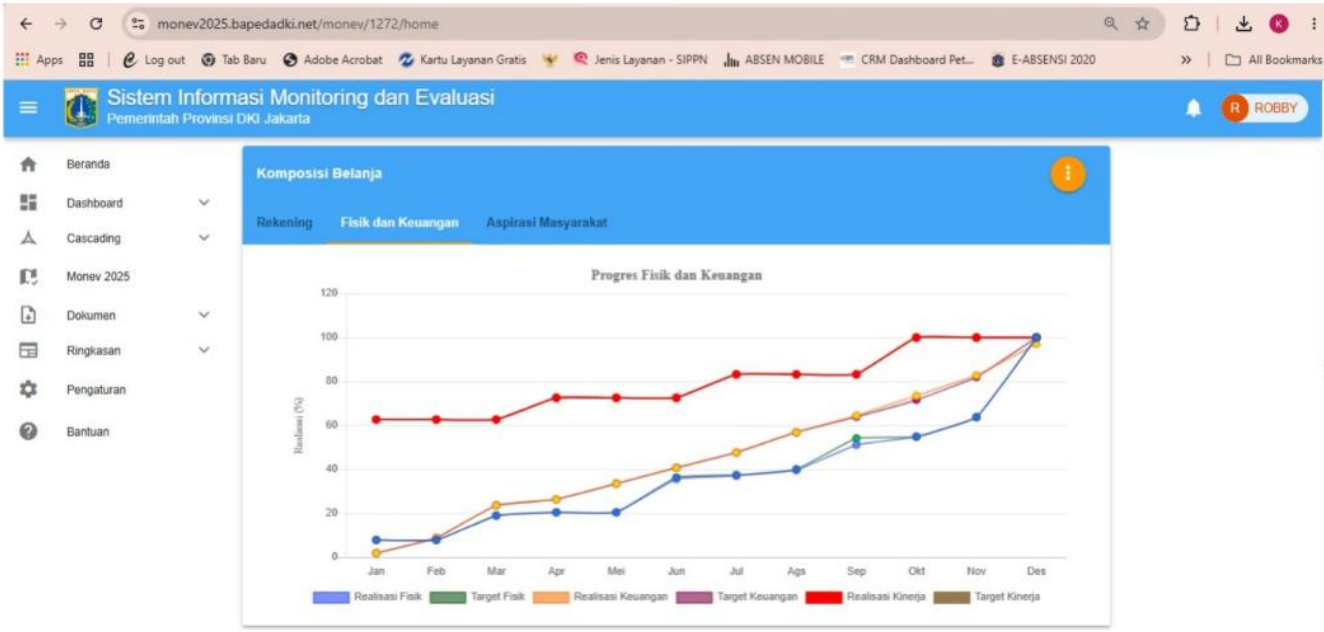
PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, SKPD diwajibkan menyusun laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem Dan Prosedur Akuntansi Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transakai dan kejadian-kejadian penting lainnya. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

LAMPIRAN



Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Ringkasan Belanja

Kode	Uraian	Pagu		Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
		Penetapan	Perubahan		
5	BELANJA DAERAH	10.635.521.455	10.714.115.830	10.395.494.896	97,03%
5.1	BELANJA OPERASI	10.573.880.085	10.669.338.383	10.362.916.396	97,13%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.573.880.085	10.669.338.383	10.362.916.396	97,13%
5.2	BELANJA MODAL	61.641.370	44.777.447	32.578.500	72,76%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.641.370	44.777.447	32.578.500	72,76%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0	0	0	NaN%
5.4	BELANJA TRANSFER	0	0	0	NaN%



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa		10.669.338.383,00	10.362.916.396,00	97,13	10.012.912.482,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Imbalan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		10.669.338.383,00	10.362.916.396,00	97,13	10.012.912.482,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		44.777.447,00	32.578.500,00	72,76	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		44.777.447,00	32.578.500,00	72,76	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		10.714.115.830,00	10.395.494.896,00	97,03	10.012.912.482,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(10.714.115.830,00)	(10.395.494.896,00)		(10.012.912.482,00)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		(10.714.115.830,00)	(10.395.494.896,00)		(10.012.912.482,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2026
LURAH KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL


SUPRIONO

NIP. 198004172007011011



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50141005 - KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN					
BEBAN OPERASI		10.356.717.529,00	9.959.281.841,00	397.435.688,00	3,99
Beban Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa		10.356.717.529,00	9.959.281.841,00	397.435.688,00	3,99
Beban Barang		1.127.883.151,00	1.153.818.008,00	(25.934.857,00)	(2,25)
Beban Jasa		6.721.967.842,00	8.694.267.621,00	(1.972.299.779,00)	(22,69)
Beban Pemeliharaan		85.641.536,00	111.196.212,00	(25.554.676,00)	(22,98)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak		2.421.225.000,00	0,00	2.421.225.000,00	0,00
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		100.437.260,00	107.802.298,00	(7.365.038,00)	(6,83)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		41.711.876,00	49.076.914,00	(7.365.038,00)	(15,01)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		58.725.384,00	58.725.384,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50141005 - KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
BEBAN					
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		10.457.154.789,00	10.067.084.139,00	390.070.650,00	3,87
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		(10.457.154.789,00)	(10.067.084.139,00)	(390.070.650,00)	3,87
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA					
BEBAN TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO		(10.457.154.789,00)	(10.067.084.139,00)	(390.070.650,00)	3,87

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2026
LURAH KELURAHAN CIPETE SELATAN -
JAKSEL

Supriono
NIP 198004172007011011



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas		0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		26.735.380,00	12.986.134,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka		26.735.380,00	12.986.134,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		56.309.956,00	71.541.363,00
Barang Pakai Habis		56.309.956,00	71.541.363,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		83.045.336,00	84.527.497,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah		4.800.000.000,00	4.800.000.000,00
Peralatan dan Mesin		1.466.665.535,00	1.409.278.535,00
Gedung dan Bangunan		2.022.207.677,00	2.022.207.677,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(2.809.407.459,00)	(2.715.133.072,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(1.374.453.620,00)	(1.338.904.617,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(1.434.953.839,00)	(1.376.228.455,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		5.479.465.753,00	5.516.353.140,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		673.654.583,00	673.654.583,00
Aset Rusak Berat/Usang		673.654.583,00	673.654.583,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Uang Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup - Uang Jaminan Reklamasi		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjam-pakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(673.654.583,00)	(632.593.583,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(673.654.583,00)	(632.593.583,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	41.061.000,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		5.562.511.089,00	5.641.941.637,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja		8.458.475,00	6.649.003,00
Utang Belanja Pegawai		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		8.458.475,00	6.649.003,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		8.458.475,00	6.649.003,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0,00	0,00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOSP		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal BLUD		0,00	0,00
Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		8.458.475,00	6.649.003,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...- Jangka Panjang		0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)		0,00	0,00
JICA SLA 1263 (Proyek MRT)		0,00	0,00
Utang PEN		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...- Jangka Panjang		0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)		0,00	0,00
JICA SLA.... (Proyek MRT)		0,00	0,00
Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Kewajiban Konsesi Jasa		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang di BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		8.458.475,00	6.649.003,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		(4.856.760.282,00)	(4.377.619.848,00)



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		10.410.812.896,00	10.012.912.482,00
RK PPKD Kas		10.395.494.896,00	10.012.912.482,00
RK PPKD Non Kas		15.318.000,00	0,00
JUMLAH EKUITAS		5.554.052.614,00	5.635.292.634,00
JUMLAH EKUITAS		5.554.052.614,00	5.635.292.634,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.562.511.089,00	5.641.941.637,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2026

LURAH KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL PROVINSI
DKI JAKARTA

Supriono

NIP. 198004172007011011



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023		(4.377.619.848,00)	(3.702.612.285,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		10.012.912.482,00	9.392.076.576,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025		5.635.292.634,00	5.689.464.291,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023		10.012.912.482,00	9.392.076.576,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(10.012.912.482,00)	(9.392.076.576,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		5.635.292.634,00	5.689.464.291,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(10.457.154.789,00)	(10.067.084.139,00)
Mutasi RK PPKD		10.410.812.896,00	10.012.912.482,00
Koreksi Ekuitas		(34.898.127,00)	0,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		(81.240.020,00)	(54.171.657,00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		(4.856.760.282,00)	(4.377.619.848,00)
RK PPKD		10.410.812.896,00	10.012.912.482,00
EKUITAS AKHIR		5.554.052.614,00	5.635.292.634,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2026

LURAH KELURAHAN CIPETE SELATAN -
JAKSEL

SUPRIONO

NIP. 198004172007011011

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL
KODE SKPD/UKPD : 00648

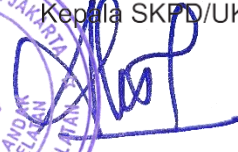
KIB A
(Tanah)



Aset Tetap Rekon Review Tahun 2026

NO.	KODE BARANG	REG.	JENIS BARANG	UKU-RAN	SATU-AN	TGL. OLEH (DD/MM/YYYY)	ALAMAT	TGL. SER-TIFIKAT (DD/MM/YYYY)	NO. SERTIFIKAT	STS. TA-NAH	PENGUNAAN	ASAL OLEH	HARGA (Rp.)	KAPITALISASI (Rp.)	TOTAL (Rp.)	KET.
1	131010104001	000001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	200	M2	31/12/1969	ASEM II RT.003 RW.003	25/03/1981	226	1	EKS. KANTOR KELURAHAN CIPETE SELATAN	1	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH
2	131010101001	000001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	300	M2	31/12/1978	PANGERAN ANTASARI RT.000 RW.000	14/10/2020	369/-076.31	1	RUMAH DINAS	1	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00	TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOL. I
3	131010104001	000002	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	945	M2	31/12/1992	Palem No.017 A RT.012 RW.003	06/02/2023	SHP/00900/Cipete Selatan	1	KANTOR	1	2,700,000,000.00	0.00	2,700,000,000.00	TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH

Mengetahui,
Kepala SKPD/UKPD/UPB


SUPRIONO
NIP. 198004172007011011



Jakarta, 30 Jun 2026
Pengurus Barang


Ratna Susilowati
NIP. 197611091998032002

BAHAN		SATUAN		ASAL OLEH	STATUS TANAH	KONDISI	
1	Kayu	31	Semen	1. Pengadaan Barang yang Dibeli atau Diperoleh atas Beban APBD 2. Hibah/Sumbangan atau yang Sejenis 3. Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak 4. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5. Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap 6. Divestasi 7. Hasil Inventarisasi 8. Hasil Tukar Menukar 9. Pembatalan Penghapusan 10. Perolehan/Penerimaan Lainnya	1	Milik Pemda DKI	1 Baik 3 Rusak Ringan 4 Rusak Berat
2	Besi	32	Tulang		2	Milik Negara	
3	Rotan	33	Wool		3	Hak Pakai	
4	Jok	34	Baja		4	Swadaya	
5	Plastik	35	Keramik		5	Hak Guna Bangunan	
6	Gelas/Kaca/Beling	36	Kristal		6	Hak Pengelolaan	
7	Fiberglass	37	Bensin		7	Wakaf	
8	Emas	38	Marmmer		8	Hak Lainnya	
9	Intan	39	Melamin		9	Lain-Lain	
10	Alumunium	40	Metal				
11	Tembaga	41	Pasir				
12	Mika	42	Triplek				
13	Kain	43	Timah				
14	Akrilik	44	Seng				
15	Kertas	45	Aspal				
16	Batu	46	Beton				
17	Beras	47	Beton Bertulang				
18	Beras	48	ConBlok				
19	Busa	49	Hotmix				
20	Kaolin	50	Pipa				
21	Karet	51	Kabel				
22	Karpet	52	Campuran				
23	Kertas Foto	53	Lainnya				
24	Kulit						
25	Kuningan						
26	Logam						
27	Perunggu						
28	Plakat						
29	Porselen						
30	Rapido						

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL
KODE SKPD/UKPD : 00648

KIB B
(Peralatan dan Mesin)



Aset Tetap Rekon Review Tahun 2026

NO.	KODE BARANG	REG.	JENIS BARANG	UKU-RAN	SATU-AN	TGL. OLEH (DD/MM/YYYY)	BA-HAN	MEREK	TYPE	TGL. BPKB/ TGL. DOK. (DD/MM/YYYY)	NO. CHASIS/ NO. RANGKA	NO. MESIN/ NO. PABRIK	NOMOR POLISI	ASAL OLEH	HARGA (Rp.)	KAPITALISASI (Rp.)	TOTAL (Rp)
1	132050105009	000001	Peta	1	BH	18/02/1993	15						--	1	150,000.00	0.00	150,000.00
2	132050104027	000001	Lemari Kaca	1	BH	05/05/1993	52						--	1	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
3	132050201011	000001	Meja Ketik	1	BH	31/12/1993	1						--	1	302,600.00	0.00	302,600.00
4	132050201011	000002	Meja Ketik	1	BH	31/12/1993	1						--	1	302,600.00	0.00	302,600.00
5	132050201011	000003	Meja Ketik	1	BH	31/12/1993	1						--	1	302,600.00	0.00	302,600.00
6	132050201011	000004	Meja Ketik	1	BH	31/12/1993	1						--	1	303,000.00	0.00	303,000.00
7	132050201011	000005	Meja Ketik	1	BH	31/12/1993	1						--	1	130,975.00	0.00	130,975.00
8	132050206039	000001	Mimbar/Podium	1	BH	31/12/1993	1						--	1	167,160.00	0.00	167,160.00
9	132050307007	000001	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/1993	1						--	1	440,479.00	0.00	440,479.00
10	132050307007	000002	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/1993	1						--	1	440,479.00	0.00	440,479.00
11	132050307007	000003	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/1993	1						--	1	440,479.00	0.00	440,479.00
12	132050307007	000004	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/1993	1						--	1	440,479.00	0.00	440,479.00
13	132050307007	000005	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/1993	1						--	1	440,479.00	0.00	440,479.00
14	132050307007	000006	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/1993	1						---	1	440,480.00	0.00	440,480.00
15	132050105005	000007	White Board	1	BH	31/12/2003	42						--	1	264,200.00	0.00	264,200.00
16	132050105005	000008	White Board	1	BH	31/12/2003	42						--	1	264,200.00	0.00	264,200.00
17	132050105005	000009	White Board	1	BH	31/12/2003	42						--	1	264,800.00	0.00	264,800.00
18	132050201039	000001	Meja Komputer	1	BH	31/12/2003	1						--	1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
19	132100102002	000001	Lap Top	1	BH	31/12/2009	52	Acer					--	1	12,925,000.00	0.00	12,925,000.00
20	132050104027	000002	Lemari Kaca	1	BH	31/12/2010	52						--	1	8,140,000.00	0.00	8,140,000.00
21	132050201048	000001	Sofa	1	BH	31/12/2010	52	Elite	--				--	1	6,655,000.00	0.00	6,655,000.00
22	132050204001	000001	Lemari Es	1	BH	31/12/2010	52	SANYO					--	1	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00
23	132050206002	000001	Televisi	1	UN	31/12/2010	52	Sanyo	--				--	1	3,399,000.00	0.00	3,399,000.00
24	132050206012	000001	Wireless	1	UN	31/12/2010	52	Shure & Vivitec	--				--	1	13,579,500.00	0.00	13,579,500.00
25	132050307007	000018	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/2010	52						--	1	8,662,500.00	0.00	8,662,500.00

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL
KODE SKPD/UKPD : 00648

KIB B
(Peralatan dan Mesin)



Aset Tetap Rekon Review Tahun 2026

NO.	KODE BARANG	REG.	JENIS BARANG	UKU-RAN	SATU-AN	TGL. OLEH (DD/MM/YYYY)	BA-HAN	MEREK	TYPE	TGL. BPKB/ TGL. DOK. (DD/MM/YYYY)	NO. CHASIS/ NO. RANGKA	NO. MESIN/ NO. PABRIK	NOMOR POLISI	ASAL OLEH	HARGA (Rp.)	KAPITALISASI (Rp.)	TOTAL (Rp)
26	132100102001	000001	P.C Unit	1	BH	31/12/2010	52	Acer					--	1	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00
27	132050101008	000001	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	UN	31/12/2011	5	Brother	GX 6750				---	1	2,392,500.00	0.00	2,392,500.00
28	132050101008	000004	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	UN	31/12/2011	5	Brother	GX 6750				--	1	2,392,500.00	0.00	2,392,500.00
29	132050104002	000001	Lemari Kayu	1	BH	31/12/2011	1						---	1	2,992,000.00	0.00	2,992,000.00
30	132050104002	000002	Lemari Kayu	1	BH	31/12/2011	1						--	1	2,992,000.00	0.00	2,992,000.00
31	132050104002	000003	Lemari Kayu	1	BH	31/12/2011	1						--	1	2,992,000.00	0.00	2,992,000.00
32	132050104002	000004	Lemari Kayu	1	BH	31/12/2011	1						--	1	2,992,000.00	0.00	2,992,000.00
33	132050104002	000005	Lemari Kayu	1	BH	31/12/2011	1						--	1	2,992,000.00	0.00	2,992,000.00
34	132050105077	000001	Papan Pengumuman	1	BH	31/12/2011	1						--	1	533,500.00	0.00	533,500.00
35	132050105077	000002	Papan Pengumuman	1	BH	31/12/2011	1						--	1	533,500.00	0.00	533,500.00
36	132050105077	000003	Papan Pengumuman	1	BH	31/12/2011	1						--	1	533,500.00	0.00	533,500.00
37	132050105077	000004	Papan Pengumuman	1	BH	31/12/2011	1						--	1	533,500.00	0.00	533,500.00
38	132050201030	000002	Kursi Rapat	1	BH	31/12/2011	52						--	1	467,500.00	0.00	467,500.00
39	132050201030	000003	Kursi Rapat	1	BH	31/12/2011	52						--	1	467,500.00	0.00	467,500.00
40	132050201030	000004	Kursi Rapat	1	BH	31/12/2011	52						--	1	467,500.00	0.00	467,500.00
41	132050201030	000006	Kursi Rapat	1	BH	31/12/2011	52						--	1	467,500.00	0.00	467,500.00
42	132050201030	000007	Kursi Rapat	1	BH	31/12/2011	52						--	1	467,500.00	0.00	467,500.00
43	132050201030	000008	Kursi Rapat	1	BH	31/12/2011	52						--	1	467,500.00	0.00	467,500.00
44	132050206002	000002	Televisi	1	UN	31/12/2011	52	LG					--	1	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
45	132100102002	000002	Lap Top	1	BH	31/12/2011	52	Toshiba	--				--	1	13,800,000.00	0.00	13,800,000.00
46	132050104024	000001	Laci Box	1	BH	31/12/2012	1						--	1	704,000.00	0.00	704,000.00
47	132050104024	000002	Laci Box	1	BH	31/12/2012	1						--	1	704,000.00	0.00	704,000.00
48	132050104024	000003	Laci Box	1	BH	31/12/2012	1						--	1	704,000.00	0.00	704,000.00
49	132050105043	000001	LCD Projector/Infocus	1	UN	31/12/2012	52	Panasonic					--	1	7,150,000.00	0.00	7,150,000.00
50	132050206012	000002	Wireless	1	UN	31/12/2012	52	MR-2200Pro					--	1	8,728,500.00	0.00	8,728,500.00

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL
KODE SKPD/UKPD : 00648

KIB B
(Peralatan dan Mesin)



Aset Tetap Rekon Review Tahun 2026

NO.	KODE BARANG	REG.	JENIS BARANG	UKU-RAN	SATU-AN	TGL. OLEH (DD/MM/YYYY)	BA-HAN	MEREK	TYPE	TGL. BPKB/ TGL. DOK. (DD/MM/YYYY)	NO. CHASIS/ NO. RANGKA	NO. MESIN/ NO. PABRIK	NOMOR POLISI	ASAL OLEH	HARGA (Rp.)	KAPITALISASI (Rp.)	TOTAL (Rp)
51	132050307007	000007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/2012	1	ACTIV CUPU					--	1	715,000.00	0.00	715,000.00
52	132050307007	000008	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/2012	1	ACTIV CUPU					--	1	715,000.00	0.00	715,000.00
53	132050307007	000009	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/2012	1	ACTIV CUPU					--	1	715,000.00	0.00	715,000.00
54	132050307007	000010	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/2012	1	ACTIV CUPU					--	1	715,000.00	0.00	715,000.00
55	132050307007	000011	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/2012	1	ACTIV CUPU					--	1	715,000.00	0.00	715,000.00
56	132050307007	000012	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/2012	1	ACTIV CUPU					--	1	715,000.00	0.00	715,000.00
57	132050307007	000014	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/2012	1	PANEL					--	1	577,500.00	0.00	577,500.00
58	132050307007	000015	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/2012	1	PANEL					--	1	577,500.00	0.00	577,500.00
59	132060201010	000001	Facsimile	1	UN	31/12/2012	52	Panasonic	KX-FP711				--	1	1,987,700.00	0.00	1,987,700.00
60	132100102002	000003	Lap Top	1	BH	31/12/2013	2	SONY VAIO					--	1	7,942,000.00	0.00	7,942,000.00
61	132100203003	000003	Printer (Peralatan Personal Komputer	1	UN	31/12/2013	2	HP	Laserjet P1				--	1	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00
62	132020102003	000002	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawa	1	UN	31/12/2014	2	TOYOTA	Rush G		MHFE2CJ2CK027186	DCP9043	B-1031-BQN	1	194,662,500.00	0.00	194,662,500.00
63	132050105002	000001	CCTV - Camera Control Television Sys	1	UN	31/12/2014	2						--	1	11,440,000.00	0.00	11,440,000.00
64	132050201008	000001	Meja Rapat	1	BH	31/12/2014	1				TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	4,037,000.00	0.00	4,037,000.00
65	132050201008	000002	Meja Rapat	1	BH	31/12/2014	1				TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	4,037,000.00	0.00	4,037,000.00
66	132050201035	000001	Bangku Tunggu	1	BH	31/12/2014	2	VEROTY					--	1	5,445,000.00	0.00	5,445,000.00
67	132050201035	000002	Bangku Tunggu	1	BH	31/12/2014	2	VEROTY					--	1	5,445,000.00	0.00	5,445,000.00
68	132050201035	000003	Bangku Tunggu	1	BH	31/12/2014	2	VEROTY					--	1	5,445,000.00	0.00	5,445,000.00
69	132050204004	000001	A.C. Split	1	UN	31/12/2014	2	LG			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	3,465,000.00	0.00	3,465,000.00
70	132050204004	000002	A.C. Split	1	UN	31/12/2014	52	LG			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	3,465,000.00	0.00	3,465,000.00
71	132050204004	000003	A.C. Split	1	UN	31/12/2014	52	LG			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	3,465,000.00	0.00	3,465,000.00
72	132050204004	000004	A.C. Split	1	UN	31/12/2014	52	LG			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	3,465,000.00	0.00	3,465,000.00
73	132050204004	000005	A.C. Split	1	UN	31/12/2014	52	LG			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	3,465,000.00	0.00	3,465,000.00
74	132050204004	000006	A.C. Split	1	UN	31/12/2014	52	LG			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	3,465,000.00	0.00	3,465,000.00
75	132050206002	000003	Televisi	1	UN	31/12/2014	2	SHARP	LED		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	4,345,000.00	0.00	4,345,000.00

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL
KODE SKPD/UKPD : 00648

KIB B
(Peralatan dan Mesin)



Aset Tetap Rekon Review Tahun 2026

NO.	KODE BARANG	REG.	JENIS BARANG	UKU-RAN	SATU-AN	TGL. OLEH (DD/MM/YYYY)	BA-HAN	MEREK	TYPE	TGL. BPKB/ TGL. DOK. (DD/MM/YYYY)	NO. CHASIS/ NO. RANGKA	NO. MESIN/ NO. PABRIK	NOMOR POLISI	ASAL OLEH	HARGA (Rp.)	KAPITALISASI (Rp.)	TOTAL (Rp)
76	132050206058	000001	Vertikal Blind	1	BH	31/12/2014	2	SHINICHI					--	1	9,570,000.00	0.00	9,570,000.00
77	132050303008	000001	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	31/12/2014	52	Indachi					--	1	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00
78	132100203003	000004	Printer (Peralatan Personal Komputer	1	UN	31/12/2014	2	EPSON	L350		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	2,667,500.00	0.00	2,667,500.00
79	132020103002	000001	Pick Up	1	UN	31/12/2015	2	TOYOTA	Hilux S Cab		MR0ES8BB9F0060222	2KDU788234	B-9799-PTA	1	210,410,000.00	0.00	210,410,000.00
80	132100203003	000006	Printer (Peralatan Personal Komputer	1	UN	31/12/2015	2	Epson	L355				--	1	3,305,500.00	0.00	3,305,500.00
81	132050105012	000001	Mesin Absensi	1	UN	02/08/2016	5	Fingerplus	ZT1800				--	1	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
82	132100102001	000002	P.C Unit	1	BH	14/10/2016	52	Lenovo	Intel Core				--	1	8,068,500.00	0.00	8,068,500.00
83	132100102001	000003	P.C Unit	1	BH	14/10/2016	52	Lenovo	Intel Core				--	1	8,068,500.00	0.00	8,068,500.00
84	132170119004	000002	Jet Pump	1	UN	23/11/2016	52	Sanyo	Jet Pump Pd				--	1	8,728,500.00	0.00	8,728,500.00
85	132170119004	000003	Jet Pump	1	UN	23/11/2016	52	Sanyo	Jet Pump Pd				--	1	8,728,500.00	0.00	8,728,500.00
86	132010305010	000001	Pompa Air	1	UN	30/12/2016	52	DABAVON	-					1	4,345,000.00	0.00	4,345,000.00
87	132050204004	000013	A.C. Split	1	UN	30/12/2016	52	AUX	-					1	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00
88	132050204004	000014	A.C. Split	1	UN	30/12/2016	52	AUX	-					1	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00
89	132190102016	000001	Ayunan (Playground)	1	BH	30/12/2016	1	-	-					1	22,837,691.00	0.00	22,837,691.00
90	132190102020	000001	Jungkat Jungkit (Playground)	1	BH	30/12/2016	1	-	-					1	7,612,564.00	0.00	7,612,564.00
91	132090110015	000001	Dispencer	1	UN	24/02/2017		Sharp					--	1	2,841,300.00	0.00	2,841,300.00
92	132050105005	000010	White Board	1	BH	04/03/2017		Sakura					--	1	1,055,010.00	0.00	1,055,010.00
93	132050204001	000003	Lemari Es	1	BH	28/04/2017		GEA			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00
94	132050204006	000001	Kipas Angin	1	UN	28/04/2017		maspion					--	1	990,000.00	0.00	990,000.00
95	132050204006	000002	Kipas Angin	1	UN	28/04/2017		MASPION					--	1	990,000.00	0.00	990,000.00
96	132050105043	000002	LCD Projector/Infocus	1	UN	03/05/2017		Infocus IN 116X					--	1	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00
97	132050201039	000002	Meja Komputer	1	BH	03/05/2017		Ouma TA 1570 MT					--	1	1,895,000.00	0.00	1,895,000.00
98	132050201039	000003	Meja Komputer	1	BH	03/05/2017		Ouma TA 1570 MT					--	1	1,895,000.00	0.00	1,895,000.00
99	132050304007	000001	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	BH	03/05/2017		Mubarix AR 604 Ha					--	1	825,440.00	0.00	825,440.00
100	132050304007	000002	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1	BH	03/05/2017		Mubarix AR 604 Ha					--	1	825,440.00	0.00	825,440.00

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL
KODE SKPD/UKPD : 00648

KIB B
(Peralatan dan Mesin)



Aset Tetap Rekon Review Tahun 2026

NO.	KODE BARANG	REG.	JENIS BARANG	UKU-RAN	SATU-AN	TGL. OLEH (DD/MM/YYYY)	BA-HAN	MEREK	TYPE	TGL. BPKB/ TGL. DOK. (DD/MM/YYYY)	NO. CHASIS/ NO. RANGKA	NO. MESIN/ NO. PABRIK	NOMOR POLISI	ASAL OLEH	HARGA (Rp.)	KAPITALISASI (Rp.)	TOTAL (Rp)
101	132060101036	000001	Microphone/Wireless MIC	1	BH	03/05/2017		Auderpro	AP-1284PA		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	14,100,000.00	0.00	14,100,000.00
102	132050201022	000001	Meja Bayi	1	BH	05/05/2017							--	1	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00
103	132050104005	000001	Filing Cabinet Besi	1	BH	30/05/2017		Datascrip					--	1	3,194,400.00	0.00	3,194,400.00
104	132050104005	000002	Filing Cabinet Besi	1	BH	30/05/2017		Datascrip					--	1	3,194,400.00	0.00	3,194,400.00
105	132100102002	000006	Lap Top	1	BH	28/07/2017		Acer	Aspire E5 4				--	1	8,578,680.00	0.00	8,578,680.00
106	132020105004	000001	Gerobak Motor	1	UN	29/12/2017	52	VIVA	Grand Samso		MJ6VWB344HJ800103	VHCG200GD800550	B-4187-PZV	1	49,303,000.00	0.00	49,303,000.00
107	132020105004	000002	Gerobak Motor	1	UN	29/12/2017	52	VIVA	Grand Samso		MJ6VWB344HJ800169	VHCG200GD800669	B-4047-PZV	1	49,303,000.00	0.00	49,303,000.00
108	132020105004	000003	Gerobak Motor	1	UN	29/12/2017	52	VIVA	Grand Samso		MJ6VWB344HJ800101	VHCG200GD800654	B-4015-PZV	1	49,303,000.00	0.00	49,303,000.00
109	132050204004	000009	A.C. Split	1	UN	27/08/2018		PANASONIC							4,950,000.00	0.00	4,950,000.00
110	132050204004	000010	A.C. Split	1	UN	27/08/2018		PANASONIC							4,950,000.00	0.00	4,950,000.00
111	132050204015	000001	A.C. Floor Standing	1	UN	27/08/2018		PANASONIC	CS-J45FFP8						36,850,000.00	0.00	36,850,000.00
112	132050204015	000002	A.C. Floor Standing	1	UN	27/08/2018		PANASONIC	CS-J45FFP8						36,850,000.00	0.00	36,850,000.00
113	132050206008	000002	Sound System	1	UN	27/08/2018		AUDERPRO							12,265,000.00	0.00	12,265,000.00
114	132050206008	000003	Sound System	1	UN	27/08/2018		AUDERPRO							12,265,000.00	0.00	12,265,000.00
115	132050105003	000001	Papan Visual/Papan Nama	1	BH	06/09/2018		LISTEN VISION							14,575,000.00	0.00	14,575,000.00
116	132050105003	000002	Papan Visual/Papan Nama	1	BH	06/09/2018		LISTEN VISION							14,575,000.00	0.00	14,575,000.00
117	132020105004	000004	Gerobak Motor	1	UN	03/12/2018		KAISAR	Triseda 250	03/12/2018	MGDT25MKTJJ300240	167MMJ1505027	B-4506-PZW		49,483,000.00	0.00	49,483,000.00
118	132100203003	000008	Printer (Peralatan Personal Komputer	1	UN	08/03/2019	5	Epson	L6190					1	5,850,000.00	0.00	5,850,000.00
119	132100203003	000009	Printer (Peralatan Personal Komputer	1	UN	08/03/2019	5	Epson	L6190					1	5,850,000.00	0.00	5,850,000.00
120	132030106001	000004	Mesin Gergaji	1	UN	15/03/2019	52	STHIL	MS 382					1	10,450,000.00	0.00	10,450,000.00
121	132050204001	000004	Lemari Es	1	BH	15/03/2019	52	Samsung	38K5032S8/S					1	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00
122	132100102002	000005	Lap Top	1	BH	15/03/2019	52	HP	240 G6 HPQ3					1	10,461,440.00	0.00	10,461,440.00
123	132050204004	000011	A.C. Split	1	UN	18/03/2019	52	CHANGHONG	SPLIT					1	3,630,000.00	0.00	3,630,000.00
124	132050102010	000002	Mesin Absen (Time Recorder)	1	UN	19/03/2019	52	FINGERSPOT	Revo FF-12					1	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
125	132100102001	000004	P.C Unit	1	BH	20/03/2019	52	HP	HP PC Sliml					1	8,269,000.00	0.00	8,269,000.00

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL
KODE SKPD/UKPD : 00648

KIB B
(Peralatan dan Mesin)



Aset Tetap Rekon Review Tahun 2026

NO.	KODE BARANG	REG.	JENIS BARANG	UKU-RAN	SATU-AN	TGL. OLEH (DD/MM/YYYY)	BA-HAN	MEREK	TYPE	TGL. BPKB/ TGL. DOK. (DD/MM/YYYY)	NO. CHASIS/ NO. RANGKA	NO. MESIN/ NO. PABRIK	NOMOR POLISI	ASAL OLEH	HARGA (Rp.)	KAPITALISASI (Rp.)	TOTAL (Rp)
126	132100102001	000005	P.C Unit	1	BH	20/03/2019	52	HP	HP PC Sliml					1	8,269,000.00	0.00	8,269,000.00
127	132100102001	000006	P.C Unit	1	BH	20/03/2019	52	HP	HP PC Sliml					1	8,269,000.00	0.00	8,269,000.00
128	132050303008	000003	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	22/03/2019	52	Chairman	DC 703					1	825,000.00	0.00	825,000.00
129	132050303008	000004	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	22/03/2019	52	Chairman	DC 703					1	825,000.00	0.00	825,000.00
130	132050303008	000005	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	22/03/2019	52	Chairman	DC 703					1	825,000.00	0.00	825,000.00
131	132050303008	000006	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	22/03/2019	52	Chairman	DC 703					1	825,000.00	0.00	825,000.00
132	132050303008	000007	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	22/03/2019	52	Chairman	DC 703					1	825,000.00	0.00	825,000.00
133	132050303008	000008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	22/03/2019	52	Chairman	DC 703					1	825,000.00	0.00	825,000.00
134	132050303008	000009	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	22/03/2019	52	Chairman	DC 703					1	825,000.00	0.00	825,000.00
135	132050105043	000003	LCD Projector/Infocus	1	UN	27/03/2019	52	INFOCUS	Projector I					1	9,660,000.00	0.00	9,660,000.00
136	132050105043	000004	LCD Projector/Infocus	1	UN	27/03/2019	52	INFOCUS	Projector I					1	9,660,000.00	0.00	9,660,000.00
137	132050105043	000005	LCD Projector/Infocus	1	UN	27/03/2019	52	INFOCUS	Projector I					1	9,660,000.00	0.00	9,660,000.00
138	132050104005	000003	Filing Cabinet Besi	1	BH	01/08/2019	2	Elite	-					1	3,905,000.00	0.00	3,905,000.00
139	132050104005	000004	Filing Cabinet Besi	1	BH	01/08/2019	2	Elite	-					1	3,905,000.00	0.00	3,905,000.00
140	132050104005	000005	Filing Cabinet Besi	1	BH	01/08/2019	2	Elite	-					1	3,905,000.00	0.00	3,905,000.00
141	132050104005	000006	Filing Cabinet Besi	1	BH	01/08/2019	2	Elite	-					1	3,905,000.00	0.00	3,905,000.00
142	132050204004	000012	A.C. Split	1	UN	25/09/2019	52	PANASONIC	YN 9 TKJ					1	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00
143	132020105004	000005	Gerobak Motor	1	UN	30/10/2019	52	VIVA	Grand Samso	12/09/2019	MJ6VWB344KJ880430	VHCG200GD600430	B-4984-PZW	1	51,103,000.00	0.00	51,103,000.00
144	132020105004	000006	Gerobak Motor	1	UN	21/11/2019	2	VIVA	Grand Samso	04/10/2019	MJ6VWB344KJ880641	VHCG200GD600641	B-4336-PZX	1	51,103,000.00	0.00	51,103,000.00
145	132020402001	000001	Perahu Penumpang	1	UN	07/12/2021	52	Keman	Polyethylen					1	12,727,000.00	0.00	12,727,000.00
146	132010306003	000001	Mesin Bor Beton	1	UN	14/07/2022	2	BOSCH	GSH 27 VC					1	30,096,540.00	0.00	30,096,540.00
147	132060347002	000001	Genset	1	UN	14/07/2022	2	GENKO	MT9000CE					1	12,400,920.00	0.00	12,400,920.00
148	132030101019	000001	Mesin Las Listrik	1	UN	24/07/2024	52	KRISBOW	-		-	-	-	1	1,498,500.00	0.00	1,498,500.00
149	132030102001	000001	Mesin Gerinda Tangan	1	UN	24/07/2024	52	BOSCH	-		-	-	-	1	2,053,500.00	0.00	2,053,500.00
150	132030102001	000002	Mesin Gerinda Tangan	1	UN	24/07/2024	52	BOSCH	-		-	-	-	1	2,053,500.00	0.00	2,053,500.00

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL
KODE SKPD/UKPD : 00648

KIB B
(Peralatan dan Mesin)



Aset Tetap Rekon Review Tahun 2026

NO.	KODE BARANG	REG.	JENIS BARANG	UKU-RAN	SATU-AN	TGL. OLEH (DD/MM/YYYY)	BA-HAN	MEREK	TYPE	TGL. BPKB/ TGL. DOK. (DD/MM/YYYY)	NO. CHASIS/ NO. RANGKA	NO. MESIN/ NO. PABRIK	NOMOR POLISI	ASAL OLEH	HARGA (Rp.)	KAPITALISASI (Rp.)	TOTAL (Rp)
151	132050203003	000003	Mesin Pemotong Rumput	1	UN	24/07/2024	52	HONDA	UMR435N		-	-	-	1	8,935,500.00	0.00	8,935,500.00
152	132150302005	000001	Tenda	1	BH	14/07/2025	52	Custom	Kerucut 4x4					1	15,318,000.00	0.00	15,318,000.00
153	132030106001	000005	Mesin Gergaji	1	UN	04/08/2025	52	STIHL	MS 162		-	-	-	1	4,717,500.00	0.00	4,717,500.00
154	132050203003	000004	Mesin Pemotong Rumput	1	UN	04/08/2025	52	HONDA	UMR435N		-	-	-	1	4,773,000.00	0.00	4,773,000.00
155	132150302012	000001	Tenda Pleton	1	BH	26/09/2025	52	tidak ada	Tenda Pengu					1	56,920,800.00	0.00	56,920,800.00
156	132050204005	000001	Portable Air Conditioner (Alat Pendi	1	UN	15/12/2025	52	GREE	GPC-12P2 (1					1	6,271,500.00	0.00	6,271,500.00
157	132100102001	000007	P.C Unit	1	BH	15/12/2025	52	ASUS	Expert Cent					1	15,429,000.00	0.00	15,429,000.00
158	132100203003	000010	Printer (Peralatan Personal Komputer	1	UN	15/12/2025	52	EPSON	L4261					1	4,551,000.00	0.00	4,551,000.00
159	132100203004	000001	Scanner (Peralatan Personal Komputer	1	UN	15/12/2025	52	EPSON	DS410					1	6,327,000.00	0.00	6,327,000.00

1,523,586,335.00



Mengetahui,
Kepala SKPD/UKPD/UPB

SUPRIONO
NIP. 198004172007011011

Jakarta, 30 Jun 2026
Pengurus Barang

Ratna Susilowati
NIP. 197611091998032002

BAHAN			SATUAN		ASAL OLEH	STATUS TANAH	KONDISI	
1	Kayu	31	Semen	M1 Meter Lari	1. Pengadaan Barang yang Dibeli atau Diperoleh atas Beban APBD 2. Hibah/Sumbangan atau yang Sejenis 3. Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak 4. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5. Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap 6. Divestasi 7. Hasil Inventarisasi 8. Hasil Tukar Menukar 9. Pembatalan Penghapusan 10. Perolehan/Penerimaan Lainnya	1	Milik Pemda DKI	1 Baik 3 Rusak Ringan 4 Rusak Berat
2	Besi	32	Tulang	M2 Meter Persegi		2	Milik Negara	
3	Rotan	33	Wool	M3 Meter Kubik		3	Hak Pakai	
4	Jok	34	Baja	UN Unit		4	Swadaya	
5	Plastik	35	Keramik	BH Buah		5	Hak Guna Bangunan	
6	Gelas/Kaca/Beling	36	Kristal	EK Ekor		6	Hak Pengelolaan	
7	Fiberglass	37	Bensin	UN/BH Unit/Buah	7	Wakaf		
8	Emas	38	Marmer		8	Hak Lainnya		
9	Intan	39	Melamin		9	Lain-Lain		
10	Alumunium	40	Metal					
11	Tembaga	41	Pasir					
12	Mika	42	Triplek					
13	Kain	43	Timah					
14	Akrilik	44	Seng					
15	Kertas	45	Aspal					
16	Batu	46	Beton					
17	Batu	47	Beton Bertulang					
18	Batu	48	ConBlok					
19	Kapas	49	Hotmix					
20	Kaolin	50	Pipa					
21	Karet	51	Kabel					
22	Karpet	52	Campuran					
23	Kertas Foto	53	Lainnya					
24	Kulit							
25	Kuningan							
26	Logam							
27	Perunggu							
28	Plakat							
29	Porselen							
30	Rapido							

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN CIPETE SELATAN - JAKSEL
KODE SKPD/UKPD : 00648

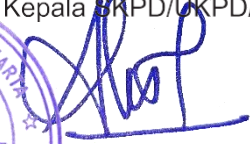
KIB C
(Gedung dan Bangunan)



BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
Aset Tetap Rekon Review Tahun 2026

NO.	KODE BARANG	REG.	JENIS BARANG	UKU-RAN	SATU-AN	TGL. OLEH (DD/MM/YYYY)	ALAMAT	KONDISI	BERTINGKAT	BETON	TANGGAL DOKUMEN (DD/MM/YYYY)	NOMOR DOKUMEN	ASAL OLEH	HARGA (Rp.)	KAPITALISASI (Rp.)	TOTAL (Rp)
1	133010101001	000002	Bangunan Gedung Kantor Permanen	700	M2	31/12/1992	Palem No.17A RT.012 RW.003	1	2		31/12/1992		1	847,700,000.00	0.00	847,700,000.00
2	133010132002	000002	Bangunan Tempat Bermain Anak	144	M2	30/12/2016	Cipete II RT.007 RW.003	1	0	1	25/11/2022	385/BM.00.03	1	1,174,507,677.00	0.00	1,174,507,677.00

Mengetahui,
Kepala SKPD/UKPD/UPB



SUPRIONO
NIP. 198004172007011011



Jakarta, 30 Jun 2026
Pengurus Barang



Ratna Susilowati
NIP. 197611091998032002

2,022,207,677.00

[illegible]